



**Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

Sekretariat Tim Kerja Konektivitas MP3EI

**KLIPING
BERITA MEDIA CETAK
TIM KERJA KONEKTIVITAS**

HARI RABU, 24 APRIL 2013



DAFTAR ISI

Bandara	1
Infrastruktur	2
Jalan Tol	3
Pelindo II.....	4
Bandara	5



Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/
BAPPENAS

KLIPING BERITA MEDIA CETAK

Tim Kerja Konektivitas

Halaman:

Hal. Koran/Media:

Bagian:

POSITIF (+)

NETRAL

NEGATIF (+)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des

2013

- ☐ Kompas
- ☐ Media Indonesia
- ☐ Koran Tempo
- ☒ Bisnis Indonesia
- ☐ Republika
- ☐ Sinar Harapan
- ☐ Suara Pembaruan
- ☐ Pikiran Rakyat
- ☐ Rakyat Merdeka
- ☐ Seputar Indonesia
- ☐ Investor Daily
- ☐ Kontan
- ☐ Lain-lain,
- ☐ Suara Karya
- ☐ Neraca
- ☐ Jurnal Nasional
- ☐ Indopos

Jenis Berita	Topik Berita	Tahun mulai	Tahun selesai	Biaya	Pelaku	Keterangan
Infrastruktur Bali Utara 3 Investor Asing Minat Garap Bandara	<div><div>- Kementerian Perhubungan memastikan sebanyak tiga investor asing siap mendanai pembangunan bandara internasional di Bali utara menyusul selesainya penyempurnaan studi kelayakan proyek itu</div><div>- Lingkup pembangunan bandara baru itu berupa runway 3.800 m x 60 m, apron, taxiway, lahan parkir, akses jalan serta fasilitas kargo dan apron kargo</div><div>- Lokasi tempat dibangunnya bandara itu sudah ditentukan, yaitu di Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng</div></div>					

► INFRASTRUKTUR BALI UTARA

3 Investor Asing Minat Garap Bandara

Ashari Purwo
ashari.purwo@bisnis.co.id

DENPASAR—Kementerian Perhubungan memastikan sebanyak tiga investor asing siap mendanai pembangunan bandara internasional di Bali utara menyusul selesainya penyempurnaan studi kelayakan proyek itu.

“Investor itu berasal dari Inggris, Jepang dan Korea,” kata Menteri Perhubungan Everst Ernest Mangindaan Se-

lasa (23/4).

Korporasi asal India yakni GVK Power & Infrastructure Limited yang awalnya menyatakan minat dan bersedia menyiapkan dana US\$1 miliar untuk membangun bandara itu, sudah hengkang dan memilih mengembangkan bandara baru di Yogyakarta. Menhub belum bersedia merinci lebih detail ketiga investor asing itu.

Sejumlah perusahaan sebelumnya juga dikabarkan ber-

minat membangun bandara internasional pendukung Bandara Ngurah Rai yang dinilai sudah padat itu, di antaranya PT Pembangunan Bali Mandiri dan Maskapai Air Asia.

Lingkup pembangunan bandara baru itu berupa runway 3.800 m x 60 m, apron, taxiway, lahan parkir, akses jalan serta fasilitas kargo dan apron kargo.

Dalam penyempurnaan feasibility study, kata Menteri, lokasi tempat dibangunnya

bandara itu sudah ditentukan, yaitu di Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng.

Pada pemetaan lokasi pembangunan sebelumnya, ada sejumlah opsi lokasi untuk bandara kedua di Bali itu a.l terletak di Kabupaten Karangasem, Buleleng dan Jembrana.

Pengembangan bandara Bali utara, kata Mangindaan, masih terkendala beberapa faktor, di antaranya pembebasan lahan dan dukungan masyarakat.



Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/
BAPPENAS

KLIPING BERITA MEDIA CETAK

Tim Kerja Konektivitas

Hal. Koran/Media:

Bagian:

Halaman:

POSITIF (+)

NETRAL

NEGATIF (+)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 27 28 29 30 31

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des

2013

- ☐ Kompas
- ☐ Media Indonesia
- ☐ Koran Tempo
- ☒ Bisnis Indonesia
- ☐ Republika
- ☐ Sinar Harapan
- ☐ Suara Pembaruan
- ☐ Pikiran Rakyat
- ☐ Rakyat Merdeka
- ☐ Seputar Indonesia
- ☐ Investor Daily
- ☐ Kontan
- ☐ Lain-lain,
- ☐ Suara Karya
- ☐ Neraca
- ☐ Jurnal Nasional
- ☐ Indopos

Jenis Berita	Topik Berita	Tahun mulai	Tahun selesai	Biaya	Pelaku	Keterangan
Gas Domestik Infrastruktur Masih Jadi Kendala	<div>- Terbatasnya infrastruktur penyaluran gas menjadi kendala dalam upaya pemenuhan kebutuhan gas domestik yang terus dilakukan SKK Migas</div> <div>- Upaya mendorong sektor industri mendekati sumber gas dapat memunculkan multiplier effect yang mampu meningkatkan perekonomian daerah tersebut</div> <div>- Pasokan gas terbesar terakhir masih berasal dari ConocoPhillips dan PT. Pertamina Ep di Sumatera Selatan yang disalurkan ke pelanggan Jawa Barat melalui pipa SSWJ</div>				SKK Migas	

► GAS DOMESTIK

Infrastruktur Masih Jadi Kendala

JAKARTA—Terbatasnya infrastruktur penyaluran gas menjadi kendala dalam upaya pemenuhan kebutuhan gas domestik yang terus dilakukan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).

Popi Ahmad Nafis, Kepala Divisi Pemanfaatan Gas SKK Migas mengatakan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas di dalam negeri terus mengarah ke Indonesia bagian timur, sedangkan industri dan konsumen migas tumbuh di Indonesia bagian barat.

Menurutnya, hal itu mengakibatkan dibutuhkan infrastrukturnya infrastruktur penyaluran gas yang lebih banyak agar konsumen yang sebagian besar berada di Indonesia bagian barat dapat menikmati gas dari sumur gas yang sebagian besar ada di Indonesia bagian timur.

“Potensi penemuan cadangan gas mayoritas di Indonesia bagian timur, karena di barat sudah dieksploitasi sejak lama. SKK Migas pun berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan gas dalam negeri. Kami mengusulkan agar segera dikembangkan transportasi gas dan mendekatkan industri kepada sumber gas,” katanya di Jakarta, Selasa (23/4).

Pada 2014 mendatang, SKK Migas menargetkan alokasi gas domestik sebesar 4.500 miliar british thermal unit per hari (bbtud). Sementara alokasi gas ekspor hanya ditargetkan sebesar 3.850 bbtud.

Selain pembangunan infrastruktur, dia menanamkan, upaya mendorong sektor industri mendekati sumber gas dapat memunculkan multiplier effect yang mampu meningkatkan perekonomian

an daerah tersebut. Pasalnya, upaya tersebut dapat menciptakan lapangan kerja dan menjadi pemicu pertumbuhan kegiatan ekonomi lainnya.

TEKNOLOGI FSRU

Teknologi floating storage regasification unit (FSRU) merupakan infrastruktur penting untuk mendistribusikan gas kepada industri. “FSRU dapat dimanfaatkan untuk penggunaan liquefied natural gas (LNG) di dalam negeri,” ungkapnya.

Sementara itu PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk sebelumnya belum mau mengembangkan infrastruktur pipa gas, jika belum ada kepastian pasokan gas. Pasalnya, perseroan belum memperoleh kontrak pasokan gas baru dalam jumlah besar dalam beberapa tahun terakhir ini.

Pasokan gas terbesar terakhir masih berasal dari ConocoPhillips dan

PT Pertamina EP di Sumatera Selatan yang disalurkan ke pelanggan Jawa Barat melalui pipa SSWJ. Menurut

Direktur Pengusahaan PGN Jobi Triananda, peningkatan infrastruktur gas akan dilakukan bila ada pasokan gas yang besar. “Sejak 2009, pengembangan infrastruktur gas domestik mengalami perlambatan. Kami hanya perkuat jaringan yang ada,” katanya.

Jobi mengungkapkan perusahaan tidak ingin membangun infrastruktur jika tidak menguntungkan.

Menurutnya, PGN tidak mungkin membangun pipa di lokasi yang tidak tersedia gas dan pembeli, seperti di wilayah Kalimantan. (LH Sunardi)



Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/
BAPPENAS

KLIPING BERITA MEDIA CETAK

Halaman:

Tim Kerja Konektivitas

Hal. Koran/Media:

Bagian:

POSITIF (+)

NETRAL

NEGATIF (+)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 27 28 29 30 31

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des

2013

- ☐ Kompas
- ☐ Media Indonesia
- ☐ Koran Tempo
- ☒ Bisnis Indonesia
- ☐ Republika
- ☐ Sinar Harapan
- ☐ Suara Pembaruan
- ☐ Pikiran Rakyat
- ☐ Rakyat Merdeka
- ☐ Seputar Indonesia
- ☐ Investor Daily
- ☐ Kontan
- ☐ Suara Karya
- ☐ Neraca
- ☐ Jurnal Nasional
- ☐ Indopos
- ☐ Lain-lain,

Jenis Berita	Topik Berita	Tahun mulai	Tahun selesai	Biaya	Pelaku	Keterangan
Jalan Tol Istaka Karya Kontraktor Cikapali Seksi ID	<div>- PT. Istaka Karya akan mengerjakan pembangunan jalan tol cikampek-palimanan (cikapali) seksi ID milik PT. Marga Lintas Sedaya</div> <div>- Ruas tol itu dirancang dalam 6 seksi pengerjaan yang akan digarap serentak</div>	2013		Rp. 370 miliar	- PT. Istaka Karya	

JALAN TOL

Istaka Karya Kontraktor
Cikapali Seksi ID

JAKARTA—PT Istaka Karya akan mengerjakan pembangunan jalan tol Cikampek–Palimanan (Cikapali) Seksi ID milik PT Marga Lintas Sedaya dengan nilai Rp370 miliar.

Direktur Utama PT Istaka Karya Kasman Muhammad mengatakan dalam minggu ini, pihaknya akan menandatangani kontrak pengerjaan proyek tersebut. Setelah itu mengkaji desain agar dalam pengerjaan dapat berjalan sesuai dengan rencana.

“Saya tidak ingat persis panjangnya, tetapi pengerjaan diharapkan lancar karena proses pembebasan lahan sudah selesai,” ujarnya ketika dihubungi *Bisnis*, Selasa (23/4).

Sejak awal 2013 pembebasan lahan untuk ruas tol Cikapali sepanjang 116,70 km sudah rampung. Ruas tol itu dirancang dalam dalam 6 seksi pengerjaan yang akan digarap serentak. Salah satu BUMN yang juga sudah menyatakan akan menggarap ruas tol tersebut ialah PT Waskita Karya Tbk yang akan menggarap paket 6A.

Kasman memaparkan baru 2 tahun belakangan perseroan mengikuti lagi tender proyek infrastruktur karena harus terlebih dahulu menyelesaikan urusan hukum yang melilit perseroan.

Lebih lanjut, dia menjelaskan perseroan akan menyasar proyek pengerjaan jalan.

“Kami akan fokus di *core business* yakni pengerjaan infrastruktur jalan. Rencana kami tahun ini bisa meraih kontrak Rp2,1 triliun,” paparnya.

Dia mengungkapkan Istaka tengah mengincar paket pengerjaan jalan tol Bawen-Solo. Perseroan sudah menyelesaikan paket III di

ruas jalan tol Semarang-Bawen.

Jalan tol Semarang-Bawen diperkirakan dapat beroperasi sebelum Lebaran tahun ini. Sementara Bawen-Solo masih dalam proses pembebasan lahan. Ruas itu merupakan bagian dari jalan tol Semarang-Solo sepanjang 75,88 km.

Kasman menjelaskan hingga sejauh ini perseroan telah mengerjakan

kan beberapa proyek jalan dan jembatan seperti Jembatan Barelai Paket V di Batam, Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta (Jatiasih–Cikunir), jalan tol Prof. Dr. Sedyatmo paket dan 6, jalan tol Semarang–Bawen Seksi III, jalan layang Imam M nandar di Riau dan jalan layar nontol Mas Mansyur di Jakarta (Thomas Mola)

Kebon Jeruk-Cileduk
Segera Operasi

JAKARTA—PT Marga Lintas Jakarta (MLJ) menargetkan proyek Jakarta Outer Ring Road (JORR) W2 Utara ruas Kebon Jeruk–Cileduk dapat beroperasi tahun ini, di mana pengerjaan konstruksi sudah mencapai 70%.

Direktur Utama MLJ Sonhadji Suharman mengatakan untuk paket IV dari Cileduk hingga Ulu-Jami masih terdapat 140 bidang tanah yang belum bebas. Panitia Pembebasan Tanah (P2T), paparnya, terus bekerja keras untuk membebaskan lahan.

Adapun, masalah yang sering terjadi ialah ketidaksesuaian harga tanah yang ditawarkan pemerintah dan yang diharapkan masyarakat. Namun pihaknya akan terus berupaya menyelesaikan konstruksi yang masih tersisa.

“Kami upayakan paket I sampai III dari Kebon Jeruk hingga Cileduk selesai tahun ini. Sisanya masih

tergantungan pembebasan lahan. Pengerjaan sekarang memang terkendala hujan, sehingga ada timbunan tanah yang perlu dibersihkan,” ujarnya Senin (22/4).

Jalan tol JORR W2 memiliki panjang 7,67 km dan dibangun dalam empat paket yakni Kebon Jeruk–Meruya Selatan, Meruya Selatan–Joglo, Joglo–Cileduk, dan Cileduk–Ulu-Jami. Data Ditjen Bina Marga Kementerian PU per 10 April mencatat pembebasan lahan untuk JORR W2 sudah mencapai 86,42%.

Untuk membebaskan tanah pemerintah telah mengeluarkan anggaran Rp818,52 miliar.

Kasubdit Pengadaan Tanah Ditjen Bina Marga Hery Marzuki menjelaskan sudah mencapai kesepakatan harga dengan beberapa pihak sehingga pembebasan lahan diharapkan rampung pada akhir 2013. (Thomas Mola)



Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/
BAPPENAS

KLIPING BERITA MEDIA CETAK

Halaman:

Tim Kerja Konektivitas

Hal. Koran/Media:

Bagian:

POSITIF (+)

NETRAL

NEGATIF (+)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des

2013

- ☐ Kompas
☐ Republika
☐ Rakyat Merdeka
☐ Suara Karya
- ☐ Media Indonesia
☐ Sinar Harapan
☐ Seputar Indonesia
☐ Neraca
- ☐ Koran Tempo
☐ Suara Pembaruan
☐ Investor Daily
☐ Jurnal Nasional
- ☒ Bisnis Indonesia
☐ Pikiran Rakyat
☐ Kontan
☐ Indopos
- ☐ Lain-lain,
.....

Jenis Berita	Topik Berita	Tahun mulai	Tahun selesai	Biaya	Pelaku	Keterangan
Priok Akan Tetapkan Tarif Baru	<div><div>-</div><div>Penaikan OPP/OPT di Pelabuhan Tanjung Priok sudah mendesak guna memberikan kepastian berusaha bagi perusahaan bongkar muat (PBM) sebagai mitra Pelindo II</div><div>-</div><div>Penyesuaian tarif bongkar muat tidak hanya mendukung operasional PBM tetapi juga untuk mendongkrak produktivitas pelayanan bongkar muat</div></div>					

► ONGKOS BONGKAR MUAT

Priok Akan Tetapkan Tarif Baru

JAKARTA—PT Pelabuhan Indonesia II akan memberlakukan tarif baru bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok yang naik rata-rata 68% mulai 1 Mei 2013 meskipun sejumlah asosiasi masih menolak langkah itu.

redaksi@bisnis.co.id

General Manager PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II Cabang Tanjung Priok Ari Henryanto mengatakan rencana kenaikan ongkos pelabuhan pemuatan/ongkos pelabuhan tujuan (OPP/OPT) di dermaga konvensional itu mengacu usulan Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) DKI Jakarta.

Menurutnya, kenaikan OPP/OPT di Pelabuhan Tanjung Priok sudah mendesak guna memberikan kepastian berusaha bagi perusahaan bongkar muat (PBM) sebagai mitra Pelindo II.

"Sudah sangat *urgent*, sedangkan upah buruh bongkar muat sudah naik tiga kali sejak 2008 dan PBM di Priok mesti di pertahankan eksistensinya sebagai mitra kerja Pelindo II," ujarnya Selasa (23/4).

Dia menilai penyesuaian tarif bongkar muat itu tidak hanya mendukung operasional PBM tetapi juga untuk mendongkrak produktivitas pelayanan bongkar muat.

Namun, Ari menegaskan pihaknya masih membuka peluang dialog dengan Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) dan Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) hingga akhir bulan ini.

"Kalau tidak ada titik temu, saya akan

► Pelindo II siap naikkan tarif bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok per 1 Mei 2013.

► Satu PBM terseleksi di Pelabuhan Tanjung Priok gulung tikar.

berlakukan tarif baru untuk OPP/OPT di Priok mulai 1 Mei," tegasnya.

Dia menegaskan OPP/OPT di Priok belum pernah disesuaikan sejak 2008, sedangkan PBM harus melakukan investasi di pelabuhan secara berkesinambungan.

Ari juga menepis anggapan bahwa rencana penyesuaian OPP/OPT di Priok bertujuan menutupi beban biaya PBM.

KONTRIBUSI

Selama ini, PBM memberikan kontribusi kepada Pelindo II Cabang Tanjung Priok sebesar 40% dari hasil kegiatan bongkar muat.

"Kalau soal kontribusi PBM itu kan sudah

Usulan Tarif Baru OPP-OPT di Pelabuhan Tanjung Priok

Golongan Barang	Tarif (Rp)
General cargo liner term (Ton)	71.000
General cargo fics term (Ton)	86.000
Hewan Ternak (Sapi, Kuda, Kerbau)	70.000
Hewan ternak (Domba, Kambing, dan Babi)	18.000
Sepeda Motor	76.000
Mobil	289.000-442.000
Truck, Bus & Excavator	776.000-1.726.000

Sumber: APBMI, diolah

diatur dan disetujui PBM terseleksi yang ada di Pelabuhan Tanjung Priok," ujarnya.

Dia juga menyatakan pihaknya siap mengurangi besaran kontribusi PBM menjadi 30% jika standar produktivitas bongkar muat yang ditetapkan terlampaui.

Namun, dia menyatakan PBM bisa dikenakan penalti jika perusahaan itu memiliki produktivitas jauh di bawah standar yang

ditetapkan kedua belah pihak.

Ari mencontohkan standar produktivitas bongkar muat peti kemas di dermaga konvensional sebanyak 60.000 twenty-foot equivalent unit (TEUs) hingga 80.000 TEUs per 100 m2 dermaga per tahun.

"Jika melewati standar itu cukup bayar kontribusi 30% tetapi jika di bawah itu kita kenakan penalti," tuturnya.

Sampai saat ini, dia mengungkapkan sudah ada satu PBM terseleksi yang tutup yakni PBM Hamparan Jala Segara dari total 16 PBM terseleksi di Pelabuhan Tanjung Priok.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta Sofian Pane sebelumnya menargetkan pembahasan OPP-OPT di Pelabuhan Tanjung Priok selesai akhir bulan ini.

Menurutnya, pihaknya sudah bertemu dengan pengurus asosiasi dalam menyikapi rencana penyesuaian tarif OPP-OPT tersebut. "Mudah-mudahan pada 1 Mei 2013 sudah ada penetapan tarif yang baru," ujarnya. (an) [E]

Pelindo II Siap Diperiksa KPPU

JAKARTA—PT Pelabuhan Indonesia II mengizinkan Komisi Pengawas Persaingan Usaha menginvestigasi langkah perseroan mendirikan 22 anak usaha bidang jasa pendukung kepelabuhanan yang dinilai sejumlah pihak berpotensi monopoli.

Sekretaris Perusahaan PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II Yan Budi Santoso mengatakan langkah strategi dalam mendirikan puluhan anak usaha itu sebenarnya tidak menyalahi peraturan karena bertujuan meningkatkan kinerja perusahaan.

Menurutnya, pendirian anak usaha itu merupakan implementasi dari rencana perseroan dalam meningkatkan kapasi-

tas, layanan, dan efisiensi di pelabuhan.

"Mereka [pelaku usaha swasta] katanya sudah lapor KPPU katanya ada monopoli, itu baru laporan dan belum sampai kesimpulan dari KPPU. Kami terbuka kalau memang ada investigasi," katanya di Jakarta, Senin malam (22/4).

Seandainya investigasi KPPU itu menyatakan bahwa BUMN pelabuhan itu dinilai keliru karena menyalahi Undang-Undang (UU) No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, imbuhnya, pihaknya akan mengkaji lagi langkah strategis itu.

"Kalau mereka mau laporkan ke DPR kami terbuka, ke KPPU juga. Seandainya dinyatakan keliru pun kami bersedia

mengkaji kembali rencana itu atau meninjau kembali," kata Yan.

Namun, dia menegaskan tuduhan monopoli jasa di pelabuhan itu tidak berdasar karena pihaknya membuka pintu seluas-luasnya bagi perusahaan swasta untuk masuk dan bersaing secara sehat, bukan memprioritaskan anak usaha.

Dalam hal tender proyek pendukung di pelabuhan, katanya, juga tetap dilakukan sesuai dengan prosedur tender sebagaimana saat ini dan transparan.

KPPU dalam kesempatan sebelumnya menyatakan dugaan praktik monopoli jasa kepelabuhan di sejumlah pelabuhan yang dikelola oleh Pelindo II sudah masuk tahap pemeriksaan pendahuluan. (M. Tahir Saleh)



Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/
BAPPENAS

KLIPING BERITA MEDIA CETAK

Halaman:

Tim Kerja Konektivitas

Hal. Koran/Media:

Bagian:

POSITIF (+)

NETRAL

NEGATIF (+)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 27 28 29 30 31

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des

2013

- ☐ Kompas
☐ Republika
☐ Rakyat Merdeka
☐ Suara Karya
- ☐ Media Indonesia
☐ Sinar Harapan
☐ Seputar Indonesia
☐ Neraca
- ☐ Koran Tempo
☐ Suara Pembaruan
☐ Investor Daily
☐ Jurnal Nasional
- ☒ Bisnis Indonesia
☐ Pikiran Rakyat
☐ Kontan
☐ Indopos
- ☐ Lain-lain,
.....

Jenis Berita	Topik Berita	Tahun mulai	Tahun selesai	Biaya	Pelaku	Keterangan
Bandara Kertajati Jabar Bentuk BUMD Pengelola	<div>- Untuk pengelolaan kebandaraan nanti Angkasa Pura bersama Pemprov Jabar akan membentuk sebuah anak usaha baru sebagai joint company</div> <div>- Keterlibatan BUMD akan mempercepat proses pembangunan bandara</div> <div>- Pemprov Jabar tengah menyiapkan hukum BUMD Baru</div>				<div>- PT. Angkasa Pura</div> <div>- BUMD</div>	

► BANDARA KERTAJATI

Jabar Bentuk
BUMD Pengelola

BANDUNG—Pemprov Jawa Barat memastikan pengelolaan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Majalengka, akan dilakukan oleh PT Angkasa Pura (AP) bersama BUMD.

redaksi@bisnis.co.id

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jabar Denny Juanda Puradimadja mengatakan pembicaraan terakhir soal keterlibatan AP sudah mendekati final.

"Untuk pengelolaan kebandaraan nanti Angkasa Pura bersama Pemprov Jabar akan membentuk sebuah anak usaha baru sebagai *joint company*," katanya, Selasa (23/4).

Menurut Denny, adanya anak usaha baru nantinya akan mengawal proses pembangunan fisik BIJB sampai operasional bandara. "AP sendiri belum menentukan apakah Angkasa Pura I atau II. Kalau mereka mau digabung silakan, yang pasti akan ada anak usaha baru."

Dia menjelaskan Jabar belum menentukan besaran dana yang akan dikucurkan untuk kelahiran badan usaha baru ini, namun modal Pemprov adalah ratusan hektare lahan yang sudah dibebaskan.

Pihaknya juga akan memiliki hak di terminal utama BIJB karena akan mengucurkan dana APBD. Sementara terminal pendukung akan diserahkan pada swasta.

"BUMD baru akan didukung perbankan, Angkasa Pura juga akan mengeluarkan dana," paparnya.

Menurut Denny, terminal pendukung akan jadi lahan bisnis utama

yang hanya mengurus kebandaraan. Jabar juga akan menggelar tujuh BUMD eksisting untuk menggarap proyek di sekitar bandara.

BUMD tersebut, lanjutnya, harus bisa mendapatkan mitra yang sesuai dengan proyek terkait. "Yang biasa garap infrastruktur, air dan energi harus bisa menggaet mitra. Nantinya akan dijabatani West Java Enterprise Partnership," tuturnya.

Dia meyakini keterlibatan BUMD akan mempercepat proses pembangunan bandara tersebut. Tahun ini, pemerintah menetapkan dua agenda terkait BIJB yakni pembebasan lahan dan *ground breaking runway BIJB*.

Sementara itu, Kepala Biro Administrasi Perekonomian Setda Provinsi Jabar Taufik Budi Susilo mengatakan BUMD baru untuk mengelola BIJB bersama AP sudah mendekati final.

Menurutnya, BUMD tersebut akan terlibat langsung sejak proses pembangunan hingga operasional. "Saat ini payung hukumnya berupa perda sedang kami susun." Dia menjelaskan dasar pembentukan BUMD Kertajati adalah Perda Nomor 13/2010 tentang Pembangunan Bandara Kertajati. Dalam peraturan itu, khususnya pasal 18, disebutkan Pemprov dapat membentuk BUMD sebagai badan pengelola.

Pembentukan BUMD tersebut

akan diperkuat juga melalui perda khusus BUMD. Jika tak ada aral melintang perda BUMD akan lahir pada Agustus 2013.

Taufik menuturkan penyusunan raperda memakan waktu cukup lama karena akan ada dua regulasi sekaligus yakni, perda pembentukan BUMD baru, dan perda penyer-taan modalnya.

BARU USULAN

Ketua Komisi C DPRD Jabar Diah Nurwitasari menilai pembentukan BUMD baru untuk BIJB tersebut baru sebatas usulan, belum masuk pada program legislasi daerah tahun ini. DPRD, kata dia, saat ini menunggu proses yang tengah dikerjakan Biro Adrek apakah raperda BUMD ini bisa masuk dan dibahas pada awal 2014.

Menurutnya, pembentukan BUMD baru untuk mengelola BIJB mendesak dilakukan karena DPRD sendiri sudah menerima banyak usulan. "Bahkan, pemerintah pusat pun menyarankan pengelolaan Bandara Kertajati dilakukan BUMD agar bisa lebih mudah berbicara bisnis dan kerja sama dengan Pemprov Jabar."

Pembangunan BIJB Kertajati di Majalengka sampai saat ini telah dilakukan penyediaan lahan seluas 718,5 ha bersumber dari APBD Provinsi Jabar. (157) [B]

► Pemprov Jabar tengah menyiapkan payung hukum BUMD baru.

► Tujuh BUMD eksisting diajak garap proyek di sekitar bandara.